



PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR : 170/24/DPRD/2016

TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
TAHUN 2017

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan yang diwakili Badan Legislasi Daerah DPRD Kota Tangerang Selatan dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang diwakili Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan telah Menyepakati Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2017;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2017.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4935);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104).
 - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 - b. Surat Walikota Tangerang Selatan Nomor: 188.24/2114-Huk, Tanggal 29 November 2016. Prihal Penyampaian Hasil Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2017;
 - c. Surat Kesepakatan Bersama Nomor: 01/Hkm/2016 dan Nomor: 188/2068-Huk/Setda/2016, tanggal 22 November 2016 Tentang Kesepakatan Bersama Antara Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Tangerang Selatan Dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2017;

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2017
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2017 sebagaimana Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
 Pada Tanggal : 30 November 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTA TANGERANG SELATAN

MOCH RAMLIE. MA

Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan
 Nomor : 170 / 24 / DPRD/2016

Tanggal : 30 November 2016

Perihal : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

NO	JENIS PRODUK HUKUM	JUDDUL/ TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		DASAR HUKUM	DISERTASI		PENYAKSI DAN INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH		NA	Pen/Ket			
1	Peraturan Daerah	Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah	Tata cara pembentukan produk hukum di daerah Kota Tangerang Selatan	√	-	1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 2. Peraturan presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah			Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Tangerang Selatan	Tahapan I	1n
2	Peraturan Daerah	Santunan Kematian	Kesejahteraan, Mekanisme pelaksanaan, Pengawasan	√	-	1. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial			Komisi II DPRD Kota Tangerang Selatan	Tahapan I	1n
3	Peraturan Daerah	Kota Layak Anak	Perlindungan Anak di Kota Tangerang Selatan, Pendidikan, Serta Hak dan Kewajiban	√	-	1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak			Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan : 1). Siti Chodijah 2). Hj. Yulhida Zahar S.Sos., M.Si 3). H. Romli Sian Mair, LC., 4). Sri Lintang Rosi Aryani, S.Psi 5). Dewi Indah Damayanti, SE	Tahapan I	1n

NO	JENIS PRODUK HUKUM	JUDUL/TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		DASAR HUKUM	DISERTASI		PEMERAKARSA DAN INSTANSI TERKAIT	TARGET PENTAMPILAN	KETE RANGAN
				BARU	UBAH		NA	Pen/Ket			
1									10	11	12
4	Peraturan Daerah	Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Tata Cara Penyidikan, Pejabat yang dapat melakukan penyidikan	✓	-	1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara			Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Tangerang Selatan	Tahapan I	
5	Peraturan Daerah	Izin Gangguan	Kriteria Gangguan, Perizinan (persyaratan izin, kewenangan pemberian izin, penyelenggaraan perizinan, Retribusi Izin), peran masyarakat, Pembinaan dan pengawasan, sanksi administratif, Penyidikan dan Ketentuan Pidana	✓	-	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah			Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Tahapan II	
6	Peraturan Daerah	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kota Tangerang Selatan	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	-	✓	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Perka BKPM Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal 3. Perka BKPM Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan			KPMD	Tahapan II	

NO	JENIS PRODUK HUKUM	JUDUL/ TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		DASAR HUKUM	DISERTASI		PEMERAKARSA DAN INSTANSI TERKAIT	TARGET/ PENTAMPAKAN	KETTE RANGKAIAN
				BARU	UBAH		NA	Pen/Ket			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Peraturan Daerah	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Retribusi Daerah	Mencabut Pasal 76 ayat (3), merubah Lampiran VIII, Laboratorium Lingkungan, Penggabungan PERDA Nomor 6 Tahun 2012 ke PERDA No 9 th 2014, Perubahan angka retribusi parkir dan menara, retribusi pengelolaan pasar	-	√	1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah 5. Keputusan Gubernur Banten Nomor 188.342/Kep.376-Huk/2016 tentang Pembatalan Pasal 76 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Retribusi Daerah 6. Keputusan Mahkamah Konstitusi terkait Pembatalan Retribusi Menara			Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Komunikasi Dan Informasi, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Tahapan II	
8	Peraturan Daerah	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Di Kota Tangerang Selatan	Prinsip Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan,	-	√	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah			Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Tahapan II	

NO	JENIS PRODUK HUKUM	JUDUL/TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		DASAR HUKUM	DISERTASI		PEMERAKARSA DAN INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETTERANGAN
				BARU	UBAH		8	9			
1			PPDB dan Sistem Pendidikan Dasar, SD, MI Ke jenjang Sekolah Menengah Pertama			Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas					
9	Peraturan Daerah	Pengarusstamaan Gender	Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi Strategis Pengarusstamaan Gender	√	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 			Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	Tahapan III	

NO	JENIS PRODUK HUKUM	JUDDU/ TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		DASAR HUKUM	DISERTASI		PEMERKASA DAN INSTANSI TERKAIT	TARGET PENTAMBAHAN	KETE RANGAN	
				BARU	UBAH		NA	Pen/Ket				
1												
10	Peraturan Daerah	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pelayanan Ketenagakerjaan	Pengalihan penyelenggaraan kewenangan ketenagakerjaan ke Provinsi Banten		√		1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah			Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Tahapan III	
11	Peraturan Daerah	Pencegahan dan Penanggulangan Imunuo Deficiency Virus (HIV) dan Acquired Imunuo Deficiency Syndrome (AIDS)	Tugas dan Wewenang, Hak dan Kewajiban, Penanggulangan HIV dan AIDS, Komisi Penanggulangan AIDS, Peran serta masyarakat, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana	√	-	1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka HIV dan AIDS			Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan	Tahapan III		


NO	JENIS PRODUK HUKUM	JUDUL/ TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		DASAR HUKUM	DISERTASI		PEMERAKARSA DAN INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAILAN	KETE RANGAN
				BARU	UBAH		NA	Pen/Ket			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Peraturan Daerah	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Perubahan pada kewenangan pengelolaan panti yang dipindahkan ke Provinsi Banten	-	√	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah			Dinas Sosial	Tahapan III	
13	Peraturan Daerah	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2031	Evaluasi materi teknis RTRW, Kesesuaian peta terhadap pola ruang dan struktur ruang, Kesesuaian peta terhadap pola ruang dan struktur ruang, Peninjauan kembali BKPRD Provinsi	-	√	1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tata Ruang Wilayah Nasional 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Tahapan IV	

NO	JENIS PRODUK HUKUM	JUDDUL / TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		DASAR HUKUM	DISERTASI		PEMERAKARSA DAN INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAILAH	KETE RANGAN
				BARU	UBAH		NA	Pen/Ket			
14	Peraturan Daerah	Ketahanan Pangan	Pengadaan, Pengelolaan dan Pendistribusian	√	-	1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi Dan Kabupaten/Kota			Dinas Pangan Pertanian Dan Perlakuan	Tahapan IV	
15	Peraturan Daerah	Bantuan Keuangan Untuk Partai Politik	Besaran nominal bantuan pembinaan politik kepada partai politik	√	-	1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Tahapan IV	

NO	JENIS PRODUK HUKUM	JUDUL/ TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		DASAR HUKUM	DISERTASI		PEMERAKARSA DAN INSTANSI TERKAIT	TARGET PENCAPAIAN	KETE RANGAN
				BARU	UBAH		MA	Pen/Ket			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Peraturan Daerah	Tata Cara Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Kecamatan	Pengaturan Tata Cara serta Mekanisme Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Kecamatan	√	-	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan			Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan		
17	Peraturan Daerah	Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016	Pelaksanaan Anggaran 2016	√	-	1. Pasal 3 Ayat (3) dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 2. Pasal 16 ayat (4) dan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		
18	Peraturan Daerah	Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017	Ringkasan Perubahan APBD, Rincian Perubahan APBD, Rekapitulasi Perubahan Belanja, Daftar Jumlah Pegawai, Daftar kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali serta daftar pinjaman daerah	√	-	1. Pasal 3 Ayat (3) dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 2. Pasal 16 ayat (4) dan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		

NO	JENIS PRODUK HUKUM	JUDUL/ TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		DASAR HUKUM	DISERTASI		PEMERAKARSA DAN INSTANSI TERKAIT	TARGET PENTAMPAILAN	KETE RANGAN
				BARU	UBAH		NA	Pen/Ket			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Peraturan Daerah	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018	Ringkasan APBD, Rincian APBD, Rekapitulasi Belanja, Daftar Jumlah Pegawai, Daftar Penyertaan Daerah, dan lain-lain	√	-	<ol style="list-style-type: none"> Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 16 ayat (4) dan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 15 ayat (4) dan Pasal 101 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN


MOCH RAMLIE. MA